

Permasalahan, Solusi dan Model Komunikasi Humas dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung

Problems, Solutions and Communication Model of Public Relation in Development Special Economic Zones Tourism of Tanjung Lesung

Iman Mukhroman¹⁾, Rangga Galura Gumelar²⁾, Iksan Ahmad³⁾

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang, Banten.

iman_mukhroman@yahoo.com¹⁾, rangga_galura@yahoo.com²⁾, iksanahmad@yahoo.com³⁾

Diterima: 27 Oktober 2014 || Revisi: 2 Desember 2014 || Disetujui: 4 Desember 2014

Abstrak – Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di satu sisi memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan destinasi unggulan di Provinsi Banten, tetapi disisi lain menimbulkan permasalahan yang harus segera dituntaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2012 tersebut, solusi apa yang dilakukan terkait masalah tersebut, serta model komunikasi yang seperti apa yang tepat untuk bisa diimplementasikan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber pada data hasil wawancara mendalam, observasi di lapangan, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil dari data tersebut kemudian dijadikan sebagai Model Komunikasi Humas Pemerintahan Provinsi Banten dan Masyarakat. yang berlandaskan pada model *two way communication* Schramm, dan model komunikasi Devito. Hasil penelitian menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kerja sebagai imbas dari belum berfungsinya dewan kawasan sebagaimana mestinya. Solusi atas masalah tersebut adalah adanya Humas Dewan Kawasan yang mengatur distribusi koordinasi dan sinkronisasi yang lebih terarah di antara pihak terkait, terutama pada pelaksana di tingkat kawasan nasional, propinsi dan daerah. Model komunikasi humas yang ditawarkan dalam penelitian ini kiranya bisa memberikan ruang publik bagi semua pemangku dalam hal pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung.

Kata Kunci: model, komunikasi, humas, KEK, pariwisata, Tanjung Lesung

Abstract – The enactment of Government Regulation (PP) No. 26 of 2012 on Special Economic Zones (SEZs) of Tanjung Lesung Tourism had a positive impact on the accelerated development of the leading destinations in the area of Banten Province, but on the other hand raises issues must be resolved. The objective of this research is to know the context of issues after the enactment of Government Regulation (PP) No. 26 In 2012, the solution of the issue, as well as the appropriate communication model to be implemented related to the development of Special Economic Zones (SEZs) of Tanjung Lesung Tourism. The research methods used a qualitative approach which is based on data from in-depth interviews, field observations, and Focus Group Discussion (FGD). The results of these data are then used as the model of PR Communications and Public Administration of Banten Province which is based on the model of two way communication of Schramm, and communications model of Devito. The results of the study reveal that the regional council has not properly utilized thus result on the weakness coordination and synchronization of work. The solution to these problems is the existence of the Public Relations Council of Regions that regulate the focused distribution of coordination and synchronization on the parties concerned, especially at the level of national, provincial and local district. PR communication models offered in this study would be able to give a public space for all stakeholders in the development of SEZs of Tanjung Lesung Tourism.

Keywords: model, communications, public relations, SEZs, tourism, Tanjung Lesung

PENDAHULUAN

Pemanfaatan potensi pariwisata saat ini diyakini sebagai salah satu sektor unggulan sebagai sumber devisa bagi negara. Pariwisata sudah diakui sebagai industri terbesar abad ini, dilihat dari berbagai indikator, seperti sumbangan terhadap pendapatan

dunia dan penyerapan tenaga kerja (Pitana dan Gayatri, 2005). Karenanya, sektor pariwisata dalam kawasan tertentu harus dikembangkan dalam hal pengelolaan yang tepat dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait. Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menyatakan

bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pada bagian UU tersebut disebutkan fungsi dari KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain.

PP Nomor 26 Tahun 2012 menyebutkan bahwa KEK Tanjung Lesung dengan luas wilayah mencapai 1.500 Ha ini masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus Zona Pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan ruang khusus dan perhatian khusus agar kemudian daerah Tanjung Lesung ini digali potensi pariwisata dan alamnya untuk kepentingan masyarakat. Konsekuensi logis dari ditetapkannya Tanjung Lesung sebagai KEK Pariwisata, tentunya harus berdasar pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Banten 2012-2017 yang dijabarkan pada rencana kerja pemerintah daerah propinsi Banten yang mendukung kebijakan strategis nasional tersebut dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, mengingat selama ini infrastruktur jalan yang kurang baik menjadi kendala minimnya kunjungan wisatawan ke Banten, termasuk juga ke Tanjung Lesung, selain akan menimbulkan dampak *multiplier* bagi daerah tersebut (Mukhroman dan Gumelar, 2013).

Mengingat pembangunan KEK Tanjung Lesung sudah masuk pada RPJMD Propinsi Banten tahun 2012-2017, dalam rencana pemerintah daerah, keberadaan peran *Public Relations* atau Humas menjadi penting artinya dalam hal pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Hal ini merujuk pada pengertian *Public Relations* (PR) dari PR News yakni: "PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan dari masyarakat" (Moore, 2004).

Penelitian sebelumnya fokus pada strategi yang digunakan oleh Pemprov Banten dengan menggunakan parameter dari model perencanaan strategi humas dari Ronald D. Smith yang membagi 4

(empat) fase, dan sembilan tahap dalam kegiatan perencanaan strategi humas, menemukan beberapa fakta bahwasannya ternyata peran lembaga humas di Pemprov Banten sangatlah kecil. Dapat dikatakan untuk hal-hal strategis ataupun terkait dengan isu-isu yang penting peran Humas tidak banyak berperan. Humas Pemerintahan Provinsi Banten hanya kemudian fokus kepada hal-hal yang sifatnya mengumpulkan kegiatan-kegiatan dari rutinitas kepala daerah semata (Mukhroman dan Gumelar, 2013). Penelitian lain terkait humas dalam pengembangan pariwisata adalah penelitian Maman Chatamallah (2008) menekankan pada penggunaan taktik : *pull strategy*, *push strategy*, dan *pass strategy*. Inti dari penelitian ini adalah bahwa dalam kegiatan humas di Provinsi Banten, penggunaan media, sejumlah kegiatan humas atau *public relations* dan programnya dibuat sangat bervariasi, keberadaan kantor penghubung yang berada di ibu kota negara, Jakarta pun bukan saja hanya menjadi etalase dan miniatur yang ditampilkan, tetapi juga sebagai media dalam upaya kerjasama dengan publik-publiknya dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten.

Terkait dengan hal di atas, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting artinya. Menurut Rasyid (2000), bahwa pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Komunikasi baik dari level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat seyogyanya harus dapat bersinergis dan harus dapat berkoordinasi dengan baik. Disinilah keberadaan humas sebagai sebutan dari terjemahan *Public Relations* menjadi penting, meski dalam konteks pemerintahan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pasal 5 dinyatakan bahwa pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertindak sebagai juru bicara gubernur.

Biro Humas Pemprov Banten secara umum berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemprov Banten, dalam hal ini haruslah melaksanakan sebagian tugas pokok yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh biro humas harus sejalan dengan upaya-upaya yang mendorong peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan pengembangan masyarakat dengan tujuan utama menciptakan *good governance* pemerintah Provinsi Banten. Untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut, haruslah diterapkan suatu kinerja yang maksimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang sudah tersedia. Oleh karena itu melihat gejala dan kenyataan di lapangan bagaimana sempitnya peran humas di Pemprov Banten serta melihat bahwa program KEK ini adalah suatu program yang harus mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bersama, maka penelitian ini mencoba untuk fokus memberikan gambaran model komunikasi humas pemerintahan dan masyarakat yang tepat ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2012 tanggal 26 Februari 2012 mengenai KEK Pariwisata Tanjung Lesung.

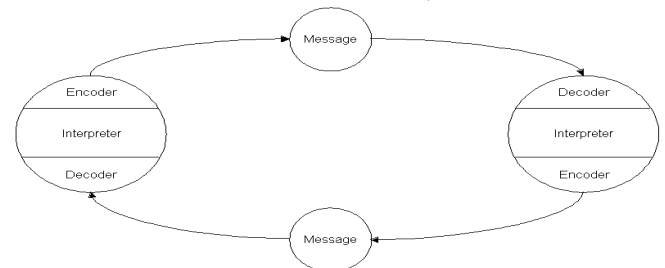
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana permasalahan, solusi dan pengembangan dalam penerapan model komunikasi humas KEK Pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang Banten. Hal ini kemudian dinyatakan pada pernyataan masalah sebagai berikut: 1) Permasalahan apa saja yang terjadi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2012 tanggal 26 Februari 2012 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung?; 2) Bagaimana solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut?; 3) Bagaimana model komunikasi humas pemerintahan dan masyarakat yang tepat pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2012 tanggal 26 Februari 2012 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung?

Terkait dengan hal tersebut di atas, fungsi dan peranan humas menjadi penting artinya. Fungsi humas kemudian adalah untuk mengantisipasi sikap publik, melaksanakan fungsi radar dan kontrol sosial secara berkelanjutan, dan melaksanakan kegiatan terencana untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman publik terhadap suatu peristiwa/kebijakan organisasi yang memiliki dampak terhadap organisasi. Peranan humas dalam suatu organisasi dapat dibagi dalam empat kategori yaitu penasehat ahli (*expert precriber*); fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*); dan teknisi komunikasi (*communication technician*) (Nova, 2009). Peran humas dalam pemerintahan ke depan semakin dibutuhkan, terutama pada era dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan yang utama serta era kemajuan teknologi.

Kepariwisata menurut Undang-undang No.10 Tahun 2009 adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pada bagian lain UU ini menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Lebih lanjut UU tersebut menyatakan bahwa daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Menurut Littlejhon (1996) dalam pengertian luas, model menunjuk pada setiap representasi simbolis dari suatu benda proses gagasan/ide. Pada level konseptual model mempresentasikan ide-ide dan proses. Dengan demikian model bisa berbentuk gambar-gambar grafis, verbal atau matematikal.

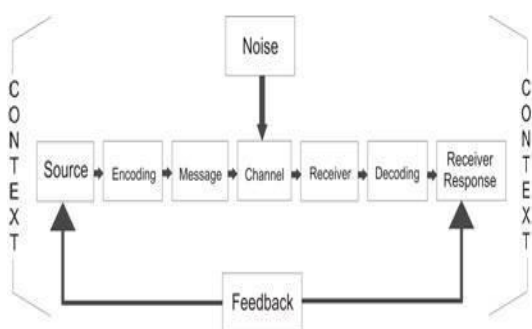
Schramm's Model of Communication, 1954



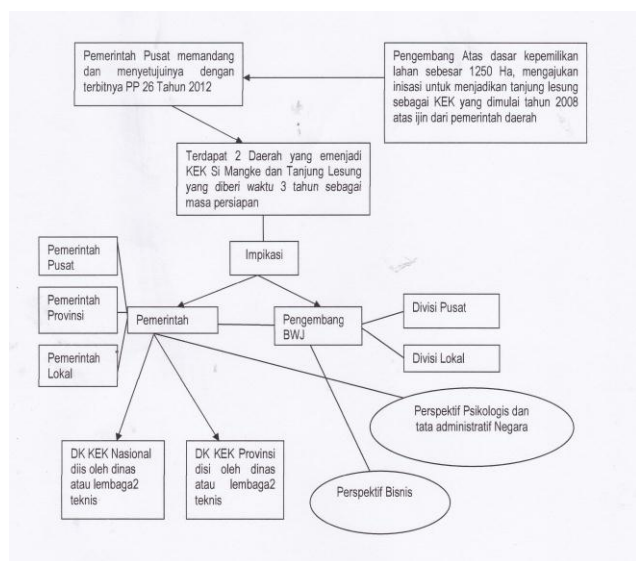
Gambar 1 Model Schramm (Effendi, 2000)

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dimana apa yang dikatakan oleh *sender* diterima secara utuh dan jelas oleh seorang *reciever*. Sehingga kemudian secara gamblang dan mudah digambarkan dalam sebuah model komunikasi Schramm dalam *two way* komunikasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Jelas terlihat bagaimana komunikasi itu adalah suatu pertukaran pesan dimana ada kegiatan *interpreter* melalui *decoder* dan *encoder*. Tetapi ketika kita berbicara tentang komunikasi antar manusia maka banyak hal yang kemudian menjadi sorotan atau kemudian menjadi suatu gangguan-gangguan. Walaupun humas adalah suatu bentuk organisasi

tetapi apa yang dihadapi atau yang ditangani adalah bukan saja penyebaran itu melalui media massa semata tetapi kearah interpersonal. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat di daerah KEK Tanjung Lesung masih dalam wilayah yang memegang kepada nilai-nilai adat dan tradisional. Sehingga pendekatannya pun tidak selalu dalam bentuk formal semata. Lebih lanjut Devito mengungkapkan dalam model komunikasinya bahwa yang harus diperhatikan adalah adanya *noise*. Bagaimana kemudian pemberi pesan mengurai hambatan-hambatan tersebut melalui kanal yang telah dipilihnya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Model De Vito (Jandt, Fred.E., 1998)



Gambar 3 Kerangka Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni pendekatan yang berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan (Bungin, 2001). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian.

Kemudian menarik permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu (Bungin, 2001). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yang terdiri dari informan pangkal dan informan pokok (*key informant*). Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil observasi yang dilakukan, kemudian dipastikan yang menjadi informan, yakni :

- (1) Bapak Ahmad Sapta Gumelar, Wakil dari Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten;
- (2) Bapak Aris, Wakil dari Biro Humas Pemerintah Provinsi Banten;
- (3) Bapak Abdul Azis, Wakil dari BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- (4) Bapak Syafrudin dan Maheno, Wakil dari Pengembang Banten West Java;
- (5) Bapak Agus Amin Mursalin, Camat Panimbang

Selanjutnya data hasil wawancara dianalisis dengan analisis data menurut Palton adalah proses mengatur pengurutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dan membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2005:203). Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisa data dengan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat sesuai dengan teori. Teknik keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Dalam konteks triangulasi inilah kemudian diadakan FGD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana gambaran umum pariwisata Provinsi Banten, pariwisata Kabupaten Pandeglang diharapkan menjadi turunan dari indikator pengembangan pariwisata di tingkat provinsi. Rata-rata pertumbuhan kunjungan ke Kabupaten Pandeglang selama lima tahun terakhir adalah 0,298 (29,8%) wisatawan domestik dan 0,157 (15,7%) rata-rata pertumbuhan wisatawan mancanegara. Rata-rata tersebut lebih

tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan kunjungan ke Provinsi Banten baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sementara itu rata-rata pertumbuhan total wisatawan ke Kabupaten Pandeglang mendekati pertumbuhan wisatawan domestik yaitu 29,7 persen (Disbudpar Provinsi Banten, 2013).

Selain itu peningkatan kunjungan wisatawan domestik cukup tinggi hampir mendekati pertumbuhan total kunjungan ke Kabupaten Pandeglang, menggambarkan bahwa Provinsi Banten merupakan tujuan wisatawan domestik. Selain itu, kunjungan tersebut menunjukkan bahwa prospek kunjungan wisata ke Kabupaten Pandeglang sangat optimis di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pandeglang lebih banyak pada destinasi-destinasi lama seperti Pantai Anyer-Carita dan Tanjung Lesung. Kunjungan mereka masih bersifat rekreatif dengan aktifitas wisata pantai dan air. Selain itu, kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten ditopang oleh adanya KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Perkembangan kunjungan tamu ke Tanjung Lesung secara berkala terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pola kunjungan bulanan yang dicatat selama dua tahun terakhir menggambarkan kenaikan yang signifikan. Kunjungan wisatawan ke kawasan (termasuk tamu hotel), pada tahun 2012 terjadi peningkatan hampir 35% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini diduga adanya berbagai liputan media terkait dengan penetapan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata (Disbudpar, 2012).

Kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan ini menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan kebutuhan akan daerah tujuan wisata dan Tanjung Lesung merupakan salah satu destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri di Provinsi Banten. Beberapa hal yang tergambar dan didapatkan dari penelitian pada wawancara yang dilakukan pada informan adalah Abdul Azis (Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal BAPPEDA Kab. Pandeglang), salah satu orang yang terlibat intens dalam proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa:

“Dengan terbitnya PP 26 tahun 2012, diharapkan bisa mendorong kehidupan masyarakat sekitar Tanjung Lesung menjadi sejahtera dalam hal ekonominya, terutama pada kawasan buffer zone

yang kita kelola sebagai kawasan penyangga KEK Tanjung Lesung ini. dimana konsep tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya strategi komunikasi yang baik. Kawasan Buffer zone ini yang menjadi penyangga kawasan ekonomi khusus yang terdiri dari 5 kecamatan diantaranya adalah kecamatan Panimbang, kecamatan Angsana, kecamatan Sukaresmi, Sobang, dan kecamatan Cigeulis”

Permasalahan Pasca Penetapan

Pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2012 yang menetapkan Tanjung Lesung di Banten Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zona Pariwisata yang efektif berlaku tiga tahun sampai dengan tahun 2015, masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Sapta Gumelar, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten, bahwa:

“Kehadiran KEK Tanjung Lesung yang notabene merupakan usulan dan inisiatif dari Badan Usaha (*Banten West Java Tourism Development*) masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pemerintah provinsi Banten dan pemerintah kabupaten Pandeglang”.

Lebih lanjut Ahmad menyatakan bahwa merujuk pada hasil kajian analisis dampak KEK Tanjung Lesung yang dilakukan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sejak Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung ditetapkan, belum terlihat percepatan persiapan yang berarti terutama dalam penyiapan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap perubahan status kawasan KEK masih sangat minim. Walaupun sudah ada pendamping yang diterjunkan, program tersebut belum menyentuh pada kesiapan mengambil peluang dari pertumbuhan sektor pariwisata di wilayahnya. Sebagian masyarakat Cikadu Endah sebagai penduduk yang direlokasi belum memperoleh pembekalan yang cukup untuk transformasi pengetahuan dan keterampilan dalam mata pencaharian dari nelayan menjadi petani penggarap.
- 2) Peran keterlibatan masyarakat penyangga Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Tanjung Lesung dalam kegiatan pariwisata masih rendah, pada umumnya masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan kegiatan pariwisata sesuai dengan persinya masing-masing. Usaha melibatkan diri dalam kegiatan pariwisata belum dikoordinasikan secara terprogram agar mendukung dan memperoleh manfaat dari perkembangan kawasan.

- 3) Walaupun belum sepenuhnya akibat penetapan KEK, masyarakat penyangga kawasan sudah dapat merasakan manfaat secara ekonomi, seperti dengan bekerja sebagai karyawan hotel-hotel di dalam kawasan, pekerja pembangunan infrastruktur, dan membuka usaha baru. Usaha mengelola *homestay*, losmen, penyewaan villa, penyewaan kapal nelayan dan usaha makanan dan minuman bagi wisatawan, adalah manfaat yang diterima masyarakat. Demikian pula dengan usaha kerajinan tetapi masih berupa sampingan dan belum memperoleh manfaat yang berarti.
- 4) Potensi dampak sosial-ekonomi yang terjadi karena KEK adalah adanya perubahan populasi penduduk di sekitar kawasan, serta terjadinya perubahan pasar kerja, yang berdampak pula pada perubahan struktur dan karakteristik masyarakat kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Demikian pula terhadap perubahan sosial individu dan keluarga, terjadi karena adanya interaksi sosial dengan wisatawan. Selain itu, kontak langsung perbedaan budaya berdampak pada lunturnya kebanggaan terhadap budaya lokal. Menurut tanggapan masyarakat, pariwisata telah banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang berakibat pada meningkatnya standar hidup masyarakat.
- 5) Terhadap ekonomi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung telah memberikan dampak terhadap perolehan devisa negara, peningkatan pendapatan langsung pemerintah, penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan infrastruktur khususnya di kawasan dan akses menuju kawasan, berkembangnya ekonomi masyarakat Tanjung Lesung, dan munculnya usaha-usaha baru di masyarakat.

Permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Pemerintah Daerah (Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang) serta Pengembang (*Banten West Java*) belum maksimal, masih dalam konteks komunikasi formal, sehingga kenyataan di lapangan yang didapatkan menyiratkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan apa yang telah menjadi tugasnya, dan apa yang dilakukan pengembang juga masih sebatas kewenangan dan tugasnya.

Kesenjangan komunikasi yang terjadi antara pengembang dan pemerintah seakan apa yang dikerjakan oleh masing-masing kurang mendukung satu sama lainnya. Ada kesan bahwa pengembang merasa telah bekerja maksimal, sedangkan dukungan dari pemerintah kurang. Pihak pemerintah merasa pengembang dalam hal ini tidak maksimal sedangkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sudah maksimal.

Pandangan masyarakat dalam hal ini melihat bahwa keduanya tidak maksimal, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pengembang. Hal ini terlihat, bagaimana masyarakat tidak terlalu menanggapi isu-isu dari KEK ini menjadi suatu konsumsi kebutuhan atau tujuan yang penting. Masyarakat bersikap pasif dan pasrah terhadap apa yang terjadi. Gerakan masyarakat atau penekanan kepada pemerintah pusat akan KEK ini pun tidak menjadi isu strategis yang semangatnya kurang jika dibandingkan dengan suasana pemekaran wilayah.

Pemerintah pusat memberikan pemberian atau porsi perhatian yang berbeda diantara KEK Tanjung Lesung dan Simangke. Berita terakhir yang diambil dari Radar Banten (21 Juni 2014) dikatakan bahwa semua perizinan di Simangke akan selesai dalam waktu empat bulan sedangkan untuk Tanjung Lesung sendiri tidak banyak isu yang dibahas. Dalam perspektif komunikasi politik, pernyataan ini mengandung arti bahwa sesungguhnya pemerintah lebih mendukung Simangke, terlebih yang mengatakan dalam hal ini adalah seorang menteri Ekuin yang juga sebagai ketua DK KEK Nasional. Pernyataan ini sesungguhnya memberikan sinyal kuat kepada daerah, agar daerah baik provinsi ataupun kabupaten harus dapat menjadikan ini sebagai berita ataupun isu yang menarik untuk dibahas, yang kemudian meminta pertanggungjawaban dari pemerintah pusat terhadap *masterplan* yang telah

ditetapkan bersama sesuai dengan kesepakatan pada awalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan di Banten sendiri melihat bahwa KEK Tanjung Lesung ini bukanlah isu strategis yang betul-betul harus diperjuangkan secara *all out*. Hal ini juga terkait dengan pernyataan dari mantan menko Ekuin Hatta Rajasa bahwa bagi segi komersial penelitian Tanjung Lesung belumlah layak.

Perbedaan perspektif antara pengembang dan pemerintah daerah menjadikan perbedaan yang tajam, sehingga kerap kali terjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Mulai dari pembebasan lahan hingga pada kesediaan infrastruktur yang dirasa kurang, sehingga investor yang dijanjikan belum terealisasi. Ketegasan pemerintah pusat akan fiskal dan perizinan lainnya serta kemudahan yang diterima oleh investor belum kunjung diterbitkan hal ini diikemukakan oleh Syafrudin sebagai narasumber dari perwakilan *Banten West Java* (BWJ) sebagai pengembang. Baginya BWJ bukanlah pengembang kecil yang tidak memiliki kekuatan negosiasi dan kapital, akan tetapi merupakan perusahaan besar yang mampu bersaing dan menciptakan serta mengembangkan Tanjung Lesung sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus. Prasarana dan infrastruktur yang dijanjikan dirasa tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Pihak BWJ sendiri dalam bahasa “halusnya” merasa berjuang sendiri, beban berat yang dirasa ini seakan dialamatkan kepada pihak BWJ. BWJ sendiri mengakui bahwa mendapatkan keuntungan dari pariwisata sangatlah lama dan tidak dapat terukur secara pasti. BWJ melihat bahwa keinginan membangun KEK Tanjung Lesung ini sebagai kawasan *elite*, sehingga memang yang dibidik adalah kalangan kelas atas. Hal inilah yang kemudian ditekankan oleh pihak BWJ bahwa pihak Tanjung Lesung membutuhkan landasan bandara dan jalan tol. Hal ini kemudian secara halus ditentang oleh pemerintah Pemprov Banten melalui Sapta (Kabid Destinasi), bahwa sesungguhnya pemerintah daerah pada dasarnya sangat mendukung terhadap pelaksanaan dan keberhasilan dari KEK ini, akan tetapi pemerintah juga mengharapkan agar pembangunan yang dilakukan dalam *masterplan* KEK ini dapat melakukan *endorse* dan meningkatkan pendapatan dari masyarakat sekitar. Artinya jika kemudian pembangunan yang dilaksanakan ini sifatnya langsung seperti bandara dan jalan tol, maka peningkatan masyarakat tidak akan terangkat. Karena secara otomotif, uang hanya berputar pada kawasan

tersebut bukan pada daerah, khususnya Pandeglang. Inilah yang kemudian jika dicermati bawasannya terdapat suatu *frame* yang berbeda.

Infrastruktur dan sarana dan prasarana seperti jalan, sesungguhnya telah dilaksanakan dan diperbaiki dengan kemampuan anggaran yang ada, provinsi dalam hal ini lebih cenderung mempersiapkan dan mencoba menjebatani agar pembangunan KEK ini berjalan lancar dan cepat sesuai dengan keinginan bersama. Izin pengelolaan lahan yang telah ada dan dikuasai oleh pihak pengembang seyogyanya dapat dijadikan sebagai landasan, artinya BWJ dalam hal ini melalui Syafrudin menyatakan bahwa ketika penetapan izin pengelolaan lahan dikuasai maka tidak terjadi jual beli pada kawasan ini, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian, banyak lahan-lahan yang masih diperjualbelikan. Pernyataan ini kemudian di luruskan oleh pihak pemerintah daerah melalui camatnya, bahwa hal tersebut memang terkadang tidak dapat dihindarkan. Artinya ketika pengembang memiliki izin pengelolaan lokasi, maka seharusnya cepat dilakukan pembebasan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Selain dari itu, pemerintah lokal dalam hal ini mewakili masyarakatnya kembali mempertanyakan kelayakan dari pembangunan lahan yang telah dikuasai oleh pihak pengembang itu sendiri sebesar 1250 HA, yang hingga saat ini baru terbangun sekitar 20% dari seluruh areal tersebut. Pembangunan lahan yang baru 20% ini kemudian dijamin oleh Maheno, perwakilan BWJ mengeluhkan lahan-lahan yang dikuasai oleh pihak luar ternyata dikuasai bukan oleh masyarakat saja, tetapi oleh para saudagar yang berada di luar Banten, seperti di Jakarta sehingga pembebasan lahan inipun menjadi alot. Kesiapan dan keseriusan dari BWJ ini kurang siap, dikarenakan pembangunannya yang sangat lambat, dan kepastian investor yang tak kunjung datang. Inilah yang kemudian menjadi persepsi di masyarakat bahwasannya pihak BWJ tidak serius.

Perbedaan dan kesenjangan komunikasi seperti ini, sesungguhnya harus didorong dalam sebuah diskusi panel yang memposisikan bahwa pihak pengembang dan pemerintah daerah baik provinsi dan daerah berdiri dalam keadaan yang sama tanpa merasa diintervensi. Dari apa yang dipaparkan tentunya terdapat *gap* komunikasi baik dari pihak pengembang dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, seharusnya terdapat suatu peran departemen ataupun peran instansi yang mencoba menjadi corong dari kedua pihak ini

melakukan suatu sosialisasi dan menjadikan isu tentang KEK ini menjadi *headline* ataupun, *trending topic* agar dapat mempengaruhi dan merubah opini di masyarakat. Yang cocok dalam hal ini adalah pengembangan peranan Humas Pemerintahan Provinsi Banten. Akan tetapi ternyata tupoksi dari Biro Humas Banten itu sendiri seakan kecil, tidaklah sesuai dengan apa yang kemudian dicita-citakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Aris (staff pemerintah Pemprov Banten bagian Humas):

“Biro Humas mengacu kepada permendagri 13 tahun 2011 hanya sebatas pada tataran yang sifatnya hanya kegiatan dan informasi dari pemerintah sebagai unit kerja yang sekedar meneruskan informasi dari pimpinan, atau menanggapi berita-berita dari media massa”.

Hal ini jika ditelaah kembali sesungguhnya tidak tepat, karena pada dasarnya fungsi humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangunan citra, pengembangan kepercayaan, dan pengelolaan krisis. "Oleh karena itu, para pengelola kehumasan ini sebagai pembangun citra dituntut mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, artinya humas harus cepat tanggap dalam mengelola dan menyebarkan berita termasuk pada penggiriangan opini publik terhadap isu-isu strategis seperti KEK Tanjung Lesung. Memang wilayah penjelasan teknis terkait KEK ini dapat ditunjukkan dan diceritakan dan diberitakan dari dinas teknis, akan tetapi harus diingat masyarakat sesungguhnya lebih mempercayai berita yang tidak terlalu rumit dan terlalu detail, cukup bagaimana masyarakat dapat mencernanya dengan mudah. Inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah saat ini. Ketakutan dan kecilnya sistem kehumasan yang ada saat ini menjadikan peran humas itu sendiri tidaklah besar, sehingga ketika ada permasalahan diatas, maka solusinya adalah dibawa dalam suatu diskusi formal tanpa melihat adanya kesempatan dalam menyelesaikan pada koridor-koridor informal.

Solusi Permasalahan Pasca Penetapan

Permasalahan yang terjadi pasca ditetapkannya KEK Tanjung Lesung, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengembang serta masyarakat harus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang efektif, sehingga kehadiran KEK Tanjung Lesung bisa memberikan manfaat kemakmuran ekonomi masyarakat. Menurut Ahmad Sapta Gumelar, agar masyarakat setempat memperoleh manfaat dari

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, maka perlu dilakukan intervensi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Menurutnya, merujuk pada hasil kajian Disbudpar Banten 2013, terdapat usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengembangan pada usaha kecil dan mikro dengan mengembangkan keterampilan dan hasil daerah setempat yang dapat di jadikan sebagai pangsa pasar yang menjanjikan.

Sementara itu terkait peran pemerintah Kabupaten Pandeglang, Sejalan dengan amanat Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah Kabupaten Pandeglang berupaya semaksimal mungkin memberikan dorongan. Menurut Abdul Azis, KEK Tanjung Lesung diharapkan bisa seirama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan (sesuai dengan kewenangannya) diantaranya melalui Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD merupakan tindak lanjut nyata yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan telah menjadi konsensus bersama antara bupati dengan kepala SKPD untuk secara sinergi membangun Kawasan *Buffer Zone* Tanjung Lesung sehingga diharapkan pada saatnya nanti masyarakat tidak hanya menjadi penonton melainkan memiliki peranan sentral seiring dengan pertumbuhan kawasan.

Menurut Abdul Azis, RAD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan RAD ini sebagai suatu terobosan dan pengembang dari struktur masyarakat Pandeglang pada umumnya dan khususnya masyarakat di Tanjung Lesung itu sendiri yang secara langsung bersinggungan dengan KEK itu sendiri. Berikut pernyataan Abdul Azis mengenai RAD yang juga termasuk kedalam rencana jangka pendek Pemkab Pandeglang:

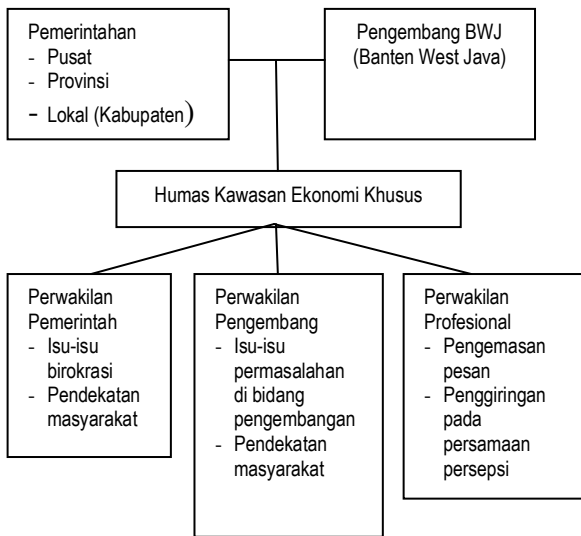
“Tahun 2013 kita sudah menyusun RAD Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Tanjung Lesung. Nah, implementasinya di tahun 2014 jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita dorong untuk perkuatan daerah-daerah Buffer Zone yang 5 kecamatan itu, itu ada dalam RAD. File-nya sudah punya kan? Itulah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah

Pandeglang terhadap penguatan baik itu kapasitas kelembagaan maupun juga produktivitas daerah Buffer Zone”

Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan di kantor Bappeda pada 10 Juni 2013, dinyatakan oleh Abdul Azis, bahwa RAD yang dibuat oleh Kabupaten Pandeglang pada 2012 lalu itu hingga saat ini ada beberapa program yang belum selesai melebihi target yang telah ditetapkan.

Model Komunikasi Humas Pasca Penetapan

Gap komunikasi yang dirasakan pada data lapangan yang diteliti ditemukannya adanya hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi baik diantara pengembang dengan pemerintah baik pemerintah lokal dan provinsi. Merujuk pada model Devito hambatan-hambatan ini kemudian haruslah direduksi agar kemudian penerimaan antara sumber dan si penerima ini dapat berjalan dengan baik, sehingga konteks yang di salurkan diterima dengan seutuhnya.



Gambar 4 Model Komunikasi Humas Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Model yang dikembangkan dari permasalahan yang ada, yaitu bahwa dalam pelaksanaan KEK itu sendiri terlihat bagaimana kemudian apresiasi dan respon masyarakat Pandeglang, atau umumnya masyarakat Banten tentang KEK ini tidaklan membumi atau tidak merakyat. KEK, walaupun berpusat atau berorientasi pada daerah Kabupaten Pandeglang, akan tetapi sesungguhnya KEK ini merupakan kebanggaan masyarakat Banten. Harus disadari bahwa dengan terlaksananya KEK dan terkenalnya KEK ini akan menjadi pendobrak dan

penggerak ekonomi di Banten. Inilah yang kemudian dilupakan oleh jajaran pemerintahan dan pengembang.

Kawasan Ekonomi Khusus yang didengungkan sebagai bagian dari tujuan wisata yang sangat indah dan bagus, akan sangat rapuh jika tidak didukung oleh masyarakat di dalamnya. Masyarakat Banten terdiri dari corak dan ragam budaya seperti masyarakat Pandeglang, Lebak, Cilegon, Serang dan Tangerang. Ini yang dilupakan oleh pemerintah dan Pengembang. Provinsi dalam hal ini haruslah mengambil suatu kebijakan dengan cara memberikan informasi dan perluasan promosi di masyarakat Banten. Tujuannya sangatlah jelas, dengan masyarakat Banten secara keseluruhan dilibatkan, maka akan ada suatu kondisi yang saling bantu dan menjadi kepentingan bersama. Dengan demikian, setidaknya perjuangan untuk menjadikan KEK ini terselenggara lebih cepat dan tepat dapat dipenuhi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Banten.

Humas Kawasan Ekonomi Khusus dirasakan perlu suatu wadah baik itu bentukan formal ataupun informal yang mencoba mempersuasi dan membuat opini publik dalam mempersespi pemikiran-pemikiran masyarakat Banten khususnya dan masyarakat nasional pada umumnya. Adanya humas KEK ini dapat dijadikan sebagai sebuah jalan representasi dan corong terhadap apa saja yang dapat dijadikan sebagai pusat informasi. Menjernihkan terhadap hambatan-hambatan komunikasi yang ada, menjadikan kekuatan masyarakat sebagai kekuatan ampuh dalam pembentukan opini dan kepercayaan publik.

Humas KEK ini dapat diisi oleh orang-orang yang memang mengerti akan fungsi dan kegunaan dari informasi yang ditujukan. Informasi yang dilakukan diolah oleh tim yang terdiri dari perwakilan pusat, daerah baik provinsi dan kabupaten disusul dengan humas dari pengembang itu sendiri. Selain dari itu Dengan adanya humas KEK ini dapat dijadikan sebagai wadah kebersamaan dalam perjuangan pembangunan KEK ini. Pembentukan dan penggiringan opini dalam perspektif adalah sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini humas KEK dapat berperan sangat strategis terutama dalam hal pencitraan.

Persamaan persepsi tentunya harus mengacu kepada kepentingan dan komunikasi baik secara vertikal seperti antar dinas, instansi atau kelembagaan, selain dari itu komunikasi harus juga dilakukan secara horisontal seperti kepada masyarakat. Artinya dalam perspektif ini, komunikasi yang dibangun harus

dibedakan bagaimana komunikasi tersebut berjalan dalam koridor formal dan non formal. Komunikasi harus dibangun dalam satu kesesuaian interpretasi dari proses *encoding* dan *decoding* merujuk pada model komunikasi Schramm. Kesamaan pada interpretasi ini menjadi sebuah modal penting dalam membangun suatu landasan komunikasi yang baik dan bersinergi satu sama lainnya. Oleh karena dalam model yang kami kembangkan pada permasalahan ini adalah model humas yang mencakup pada perspektif yang luas. Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan pada analisis model Humas Kawasan Ekonomi Khusus ini adalah :

Pertama, dalam Humas KEK, pendekatan pada persoalan baik yang ada di masyarakat Pandeglang khususnya dan masyarakat Banten ataupun yang ada pada tataran birokrasi pada umumnya dengan melalui analisis Johari Window. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan terlihat bahwa apa yang ada di dalam pemikiran masing-masing terutama dalam konteks arah dan tujuan dari pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ini tidaklah sama. Keinginan dari pemerintah dan keinginan dari pengembang serta harapan dari masyarakat pada dasarnya secara global hampir sama, akan tetapi persamaan global ini jika dituangkan dalam pelaksanaan teknis dilapangan ternyata tidaklah sama. Konsep yang ada dan aplikasi yang kemudian dijalankan tidak sesuai. Inilah yang kemudian dalam perspektif komunikasi disebut sebagai *noise*. Hambatan atau komunikasi yang kecil, jika kemudian kita biarkan tentunya akan berakibat fatal. Dalam hal ini tugas humas yang mencoba meluruskannya. Dalam penyampaian pesan yang kemudian kita lakukan pendekatan analisis Johari Window, kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya karakteristik atau identitas personal yang kita hadapi. Analisis ini sangatlah membantu dalam pelaksanaan penyampaian pesan. Pesan yang efektif adalah pesan yang utuh di terima dari seorang komunikator kepada komunikan, sehingga tidak ada distorsi pesan yang diterima.

Kedua, bagaimana kemudian humas Kawasan Ekonomi Khusus ini meredam atau membiarkan atau bahkan menghilangkan *noise* atau hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi tentunya sangatlah sulit. Akan tetapi dalam pembentukan opini publik, hambatan atau gangguan yang ada bisa disiasi dengan cara penggunaan media yang tepat dan massif. Artinya, penggunaan media saat ini sangatlah dapat dimanfaatkan terutama dalam hal-hal yang

mencoba menyamakan persepsi di kalangan luas. Jika kemudian masyarakat dibangun persepsi bahwa Tanjung Lesung adalah aset bersama dan KEK adalah program besar yang harus didukung masyarakat Banten secara lokal dan nasional pun medukungnya, maka harus disosialisasikan dengan informasi yang massif. Pemanfaatan media lama atau bahkan media baru saat ini sangatlah tepat. Keberadaan Tanjung Lesung kemudian secara *integrated* dan secara sadar akan menjadi besar. Pengelolaan dari media baru seperti jejaring sosial, ataupun website khusus tentang KEK ini, yang kemudian dikelola oleh humas KEK akan sangat memberikan kontribusi yang besar dalam arah dan tujuan serta cita-cita pembangunan KEK ini.

Pemanfaatan oleh media tidaklah kalah penting, setiap progres atau pertumbuhan percepatan pembangunan dalam kawasan ini yang sifatnya umum dapat tersalurkan kepada masyarakat. Penyebaran isu ataupun pengelolaan isu-isu yang strategis yang mungkin akan menjadi konsumsi publik dan menjadi wacana tentunya akan menjadi kontribusi yang sangat positif. Dalam observasi dan wawancara yang dilakukan sesungguhnya ditemukan keluhan-keluhan baik yang secara teknis dan non teknis didapatkan. Jika kemudian keluhan ini hanya disimpan atau hanya menjadi konsumsi pribadi saja dan tidak dituangkan akan menghambat dalam tata cara berpikir dan memandang persoalan. Sehingga tidak akan ada kesinambungan didalamnya. Ketika kemudian keluhan-keluhan ini dicoba disampaikan dalam forum koordinasi yang sangat formal, yang melibatkan tataran petinggi maka hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Karena itu sesungguhnya keluhan ini dapat ditampung dan dijadikan sebagai sebuah wacana diskusi dan dikelola dengan baik sehingga kemudian tidak terjadi perbedaan persepsi dan pandangan. Dalam lingkup masyarakat, adanya pandangan bahwa kinerja pemerintahan yang lambat, ataupun tidak profesionalnya pihak pengembang merupakan isu yang kerap kali terlontar. Hambatan dan *noise-noise* ini dapat dikikis dengan penggunaan media yang efektif sebagai bagian dari strategi komunikasi yang ada. Pendekatan terhadap masyarakat tentunya tidak sama dengan pendekatan yang dilakukan dalam koridor ataupun koordinasi birokrasi. Pendekatan dan perspektif dalam koridor ini dapat mengacu kepada model komunikasi yang dikemukakan oleh Schramm dan Devito.

Ketiga, dalam observasi dan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa dalam masing-masing

lembaga terkadang memiliki isu-isu yang tidak dapat dipecahkan dan butuh komunikasi lintas instansi. Isu-isu ini kemudian dapat dipresentasikan dan dijelaskan melalui tindakan. Humas dalam hal ini dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap apa yang harus dilakukan baik dalam komunikasi kepada masyarakat. Dengan demikian pihak humas KEK akan sangat berkonsentrasi terhadap penggiringan dan pelemparan isu-isu strategis kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bersama.

KESIMPULAN

Permasalahan yang muncul pasca ditetapkannya KEK Tanjung Lesung lebih dikarenakan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kerja di antara pihak terkait pada pengembangan Tanjung Lesung. Organisasi yang mengatur otoritas kawasan, belum berjalan sebagaimana mestinya. Solusi permasalahan yang harus ditindaklanjuti lebih pada distribusi koordinasi dan sinkronisasi yang lebih terarah di antara pihak terkait, terutama pada pelaksana di tingkat kawasan nasional, propinsi dan daerah. Rencana Aksi tentunya harus dilakukan pada tiga tingkatan tersebut secara terpadu, terarah dan berkesinambungan. Infrastruktur yang terkait dengan KEK Pariwisata Tanjung Lesung harus terus ditingkatkan, seperti rencana pembangunan bandara, kiranya bisa disegerakan. Model komunikasi humas pemerintahan dan masyarakat yang memberikan ruang publik bagi semua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting untuk segera diimplementasikan dalam hal pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Model yang ditawarkan ini mencoba untuk menekan perbedaan interpretasi antara si pengirim dan si penerima, baik dalam level Humas Pemerintahan Provinsi Banten maupun dalam level Humas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung.

Terkait dengan hal itu perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja di antara pihak terkait pada pengembangan Tanjung Lesung, sehingga pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung bisa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Kemudian Efektivitas Dewan Kawasan harus bisa menggerakkan Rencana Aksi pada setiap levelnya, sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya. Untuk itu perlu implementasi lebih lanjut terkait dengan model komunikasi humas pemerintahan dan masyarakat yang memberikan ruang publik bagi

semua pemangku kepentingan terkait pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelancaran dan kesuksesan penelitian ini tidak bisa lepas dari pihak-pihak yang membantu dan mendukung penelitian ini. Untuk itu, ungkapan terimakasih dihaturkan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) beserta Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTIRTA, yang telah memberikan kesempatan penelitian kepada kami. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada teman-teman di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNTIRTA atas pengertian dan kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2001). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Chatamallah, M (2008). Strategi Public Relations dalam Promosi Pariwisata: Studi Kasus dengan Pendekatan Marketing Public Relations di Provinsi Banten. *Jurnal Mediator FIKOM UNISBA Volume No. 9 No.2, hal. 393*.
- Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten (2013). Analisis Dampak KEK Tanjung Lesung: Banten
- Effendy, O. (2000). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT.Rosdakarya.
- Jandt, F. E. (1998). *Intercultural Communication An Introduction*, Thousand Oaks: Sage Publications
- Littlejohn, S. W. (1996). *Theories of Human Communication*, Ohio: Charles E. Merrill Company
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moore, H.F. (2004). *Humas: Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mukhroman, I. dan Gumelar, R. G. (2013). Perencanaan Strategi Humas Pemprov Banten Pasca Ditetapkannya KEK Pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. *Jurnal Kajian Komunikasi LP3 FIKOM UNPAD Volume 1 No.2 Desember 2013, hal 206-218*.
- Nova, F. (2009). *Crisis Public Relations (Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan)*. Jakarta : Grasindo.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2012 tentang KEK Pariwisata Tanjung Lesung
- Permendagri No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan*, Jakarta : Yasrif Watampone.
- Pitana, I. G. dan Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset

Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Pariwisata

Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus